

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Apa yang telah penulis sampaikan sepanjang penulisan skripsi ini hingga sampai bab kesimpulan, maka dapat dilihat watak dibalik mazab neoliberalisme yang cenderung destruktif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi negara-negara dunia ketiga. Akumulasi lewat penjarahan merupakan seni tingkat tinggi yang telah menghancurkan sistem ekonomi negara-negara berkembang berapa tahun belakangan ini. Dalam bagian ini penulis simpulkan empat fitur utama akumulasi lewat penjarahan yang dilakukan secara terstruktur, yaitu : *Pertama*, Privatisasi dan komodifikasi. Korporatisasi, komodifikasi, dan privatisasi terhadap aset-aset publik merupakan suatu fitur khas dari praktek neoliberal. Tujuan utamanya adalah untuk membuka medan-medan baru bagi akumulasi kapital dalam domain-domain yang selama ini terbatas aksesnya bagi pencaharian laba, seperti sarana dan prasarana fisik milik kolektif (air, telekomunikasi, transportasi), tunjangan kesejahteraan sosial (perumahan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pensiunan serta asuransi jiwa), institusi-institusi publik (universitas-universitas, laboratorium-laboratorium riset kesehatan maupun pertanian dan budidaya perikanan) Semuanya diprivatisasikan dengan tingkatannya masing-masing di negara neoliberal. Sebagai Contoh (Indonesia, lihat UU PMA dan PP No 76 dan 77). Komodifikasi bentuk-bentuk kebudayaan, sejarah, dan kreatifitas intelektual (Hak milik intelektual

ditetapkan melalui kesepakatan TRIS dalam WTO ).<sup>1</sup> Kekuatan negara seringkali digunakan untuk memaksakan berlangsungnya proses-proses tersebut, bahkan meski proses-proses tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Dibatalkannya regulasi yang dirancang untuk melindungi buruh (Sebagai contoh di rezim ini, keluarnya Surat Keputusan Tiga Menteri dan UU PMA yang lebih berpihak serta melindungi para pengusaha) dan lingkungan dari terdegradasi telah menghilangkan hak kedua-duanya. Diliberalisasikan hak-hak kolektif yang telah berhasil diraih berkat perjuangan kelas selama betahun-tahun (hak-hak kesejahteraan sosial, pensiunan, asuransi jiwa, atas pelayanan kesehatan, pendidikan dari negara) ke tangan swasta merupakan kebijakan paling jahat dari semua kebijakan penjarahan. Dalam hal tersebut sering mendapat perlawanan dan memprovokasi munculnya gerakan anti imperialis, karena hal-hal tersebut bertentangan dengan kehendak masyarakat luas. Proses-proses tersebut sama artinya dengan mengalihkan aset-aset publik yang semestinya dikelola sepenuhnya oleh negara kepada dunia swasta dan ke kantong-kantong kelas elit.

*Kedua*, finansialisasi atau liberalisasi keuangan, deregulasi membuat sistem keuangan menjadi salah satu pusat utama dari aktifitas redistributif dalam bentuk aktifitas spekulasi, pencaplokan perusahaan yang lebih lemah, perilaku curang dan pembobolan keuangan. Aktifitas investasi yang curang di mana para investor dibayar dengan menggunakan dana yang didapat dari para investor yang menanamkan investasinya sesudah para investir sebelumnya, penghancuran nilai aset secara terencana melalui inflasi,

---

<sup>1</sup> Industri musik merupakan contoh yang paling menonjol dari praktek penjarahan dan eksploitasi atas kebudayaan dan kreativitas akar rumput, jejaring sosial seperti Face book yang kini dikuasai oleh Microsoft dan masih banyak contoh yang lain.

penjualan aset yang murah di bawah harga pasar melalui merger dan akuisisi, dinaikannya tingkat suku bunga utang, sehingga membatasi mereka yang bisa berutang, samapai dengan aktifitas pengharusaan pembayaran utang dengan tenaga kerja, serta kecurangan korporasi dan penjarahan aset-aset melalui manipulasi-manipulasi kredit dan saham semua itu telah menjadi fitur utama dari sistem keuangan kapitalis. Diluar itu, kita juga bisa melihat aksi perampokan spekulatif yang dilakukan oleh institusi-institusi besar kapitak keuangan lainnya karena aktifitas-aktifitas inilah yang mendorong terciptannya pergerakan akumulasi lewat level global, meskipun tokoh mainstream menyebutnya sebagai “penyebaran resiko” (spreading risks).<sup>2</sup>

*Ketiga, Manajemen dan Manipulasi Krisis.* Di luar aktifitas spekulasi yang sering kali berlangsung penuh dengan kecurangan dan merupakan ciri utama dari banyak manipulasi neoliberal, berlangsung suatu proses lebih dalam yang mendorong munculnya perangkat utang sebagai suatu cara utama untuk melakukan akumulasi lewat penjarahan. Penciptaan, pengelolaan dan pemanipulasian krisis keuangan di level dunia telah menjadi seni tingkat tinggi agen-agen utama neoliberal dalam praktek redistribusi yang telah disimulasikan kekayaan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin ke negara-negara kaya. Tak banyak negara-negara berkembang yang tersentuh oleh taktik akumulasi lewat penjarahan dengan instrumen manipulasi utang. Indonesia adalah salah satu negara yang terjebak manipulasi utang yang berbuntut pada krisis keuangan. Dimana krisis keuangan tersebut dikontrol dan dikelola dengan baik untuk merasionalisasikan sistem ekonomi maupun untuk mendistribusikan aset-

<sup>2</sup> Baca keruntuhan negara-negara berkembang, akibat dari kebijakan meliberalisasikan sistem keuangan nasional. Selanjutnya baca David Harvey: *NEOLIBERAL DAN RESTORASI KELAS*.

aset negara tersebut (Amerika dan Jepang yang paling diuntungkan dalam krisis keuangan Asia terutama krisis di Indonesia).

Tidak salah jika taktik penciptaan krisis melalui utang, dianalogikan dengan taktik penciptaan secara disengaja situasi penggangguran agar terciptanya pasar tenaga kerja yang murah dan kemudian surplus tenaga kerja itu dimanfaatkan untuk kepentingan akumulasi laba lebih besar lagi.<sup>3</sup> Dalam taktik diatas aset-aset yang bernilai dibuat menganggur dan karena itu kehilangan nilainya. Aset-aset tersebut menjadi fakum, samapai kemudian kaum pemilik modal atau kapitalis membeli aset-aset yang fakum tersebut dengan harga di bawah harga pasar (Sebagai contoh PT Indosat, yang privatisasikan. IMF memberikan penilaian dan saran bahwa PT Indosat adalah BUMN yang tidak sehat dan sebaiknya diprivatisasikan, padahal PT Indosat adalah BUMN yang sehat dan memiliki prospek yang bagus). Namun taktik manipulasi tersebut, menimbulkan konsekuensi logis menyulut aksi-aksi pemberontakan anti neoliberal maupun impralis yang telah menciptakan krisis tersebut. Dalam konteks di Indonesia, Salah satu fungsi dari intervensi negara dan institusi-institusi internasional ialah untuk mengontrol krisis dan devaluasi sehingga memungkinkan akumulasi lewat penjarahan tanpa harus menimbulkan keruntuhan yang besar-besaran atau pemberontakan rakyat seperti pemberontakan zapatista di Meksiko (untuk meredam aksi-aksi tersebut, atas saran dari IMF, Bank Dunia dan pemerintah Indonesia wewujudkannya dalam pemberian berupa :OPK, PDM-DKE, DBO dan PKP pada masa Pemerintahan Gus Dur, sedangkan dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono berupa BLT, KUR, BOS dan lain sebagainya yang

<sup>3</sup> Seperti yang telah penulis simpung di bagian lain dari bab kesimpulan ini. Tenaga kerja

merupakan bagian dari Program Jaring Pengaman Sosial untuk meredam aksi-aksi pemberontakan). Program penyesuaian struktural yang di ditekankan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional diarahkan untuk menjegah terjadinya keruntuhan besar-besaran, sementara tugas dari aparat negara komprerador dengan dukungan bantuan militer dari kekuatan-kekuatan negara imprerial, tidak ada lain untuk meredam pemeberontakan rakyat di negeri itu tidak meletus. Namun, tanda-tanda pemberontakan itu bisa dilihat misalnya pemberontakan zapatista di Meksiko, Sattle US, Genoa, Bolivia, Quito dan masih banyak aksi-aksi dan pemberontakan di belahan dunia ini. yang menentang rezim Globalisasi dan Neoliberalisme.

*Keempat*, Redtribusi oleh negara. Begitu suatu negara berhasil dineoliberalisasikan, maka negara tersebut akan menjadi agen primer dari kebijakan-kebijakan redtribusi kekayaan ke kantong-kantong kelas elit. Dalam hartian hal ini telah membalik arus distribusi kekayaan dari kelas atas ke kelas bawah yang telah berjalan sepanjang era liberalisme. Proses redtribusi ini dicapai pertama-tama melalui aktifitas privatisasi dan pemangkasan-pemangkasan pengeluaran negara untuk biaya-biaya sosial.

Negara neoliberal juga melakukan redtribusi kekayaan dan pendapatan melalui revisi-revisi atas peraturan fiskal dan pajak. Revisi-revisi itu dilakukan hanya untuk menguntungkan tingkat kembalian atas investasi, dari pada menguntungkan pendapatan dan upah. Selain itu revisi-revisi itu juga dilakukan memajukan elemen-elemen regresif dalam peraturan pajak atas komudifikasi aset-aset publik maupun aset-aset strategis. Undang-Undang No 25 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No 77 memabrikan perluasan akan komudifikasi dan redtribusi

dengan melakukan revisi-revisi pajak dan fiskal, seraf membuka perluasan aset-aset publik yang lebih mengutamakan tingkat kembalian investasi ketimbang memperbanyak jumlah peredaran uang melalui upah dan pendapatan masyarakat.

Dari keempat fitur utama akumulasi lewat penjarahan ini, secara legal formal dikemas dalam bentuk Regulasi Undang-Undang No 25 tahun 2007 Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No 77 tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka bagi kepemilikan modal asing. Para elit para pembuat kebijakan dan intelektual ekonomi pendukung lahirnya UU PMA dan PP tersebut pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono adalah intelektual organik yang berafiliasi dengan politik yang menjaga keberlangsungan dominasi kelas elit yang dibungkus dalam ideologi dan praktek-praktek ekonomi neoliberal yang berwatak predator, melakukan akumulasi lewat penjarahan yang telah banyak mengorbankan masyarakat selama era liberalisme. Tanpa Basa-basi lagi, penulis mengatakan Kepemimpinan Dr. H Susilo Bambang Yudoyono dan para ekonomi pendukungnya adalah antek-antek neoliberal dan agen lobi para perusahaan-perusahaan transnasional dan multi nasional, yang telah merubah negara kesejahteraan ini menjadi negara neoliberal.

Pengaruh pahan neoliberal terhadap demokrasi ekonomi dan demokrasi politik dalam bentuk UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden No.76/2007 Tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan dan Peraturan Presiden No.77/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Modal Asing. Dapat diambil implikasinya. Pertama, kebijakan privatisasi dalam bentuk UU dan

Peraturan presiden diatas bukan hanya berdampak pada ekonomi saja tetapi juga seluruh masyarakat, sistem politik, struktur kelas, pasar domestik degradasi lingkungan. Naiknya harga jasa listrik, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya yang menyertai privatisasi, telah menurunkan standar hidup kaum buruh upahan, dan bergaji, makin tingginya biaya masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar.

Sektor-sektor yang diberikan pengolahannya atau diliberalisasikan oleh karena itu akan mengambil keuntungan dari subsidi negara sambil menikmati skala upah yang rendah dan jam kerja yang fleksibel, yang telah ditetapkan oleh negara-negara imperial dan dilegalkan oleh pemerintah kita dalam bentuk UU NO. 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing. Keuntungan baik beberapa puluh kapitalis yang terkait dengan proses privatisasi berimbas pada marginalisasi puluhan juta buruh miskin.

*Kedua*, implikasi privatisasi dalam sistem politik. Ikatan-ikatan yang kuat antara monopoli swasta memperoleh keuntungan dari privatisasi dan pemerintah eksekutif lokal menjadi alasan pokok, dimana dewan legislatif dan yudikatif lokal menjadi pihak yang kalah dalam transisi menuju pasar bebas. Lembaga-lembaga yang representatif dilampaui dalam proses transfer kekayaan negara ke tangan-tangan swasta. Dimana keputusan-keputusan besar di ambil di tempat lain, sementara parlemen paling jauh menanggapi keputusan-keputusan yang telah diambil.

Hasil dari privatisasi adalah melemahnya demokrasi dan hilangnya pengawasan legislatif terhadap sektor-sektor ekonomi yang strategis dan menguasai hajat hidup kolektif. Semakin dominannya swasta menguasai barang-barang publik maka sektor swasta tidak akan responsif atau

bertanggung jawab kepada otoritas publik, tetapi konsentrasi swasta hanya kepada kepentingan-kepentingan akumulasi laba.

## B. Saran

Dominasi kelas elit ekonomi selama era liberalisme telah mengubah sistem tata kelola ekonomi negara-negara di belahan dunia menganut paham neoliberal sebagai alternatif dalam mengurus masyarakat melalui mekanisme pasar telah menghilangkan peran tradisional negara dalam dunia sosial selama berlangsungnya era liberalisme sampai saat ini. Pembentukan hegemoni pasar melalui aparatus negara dan ideologi aparatus secara langsung telah merubah cara pandang masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Aktifitas-aktifitas tersebut di praktekkan hanya untuk menjaga keberlangsungan akumulasi lewat penjarahan. Diadopsinya teori-teori nakjis dan diarahkannya dunia pendidikan untuk menciptakan intelektual organik dan penyediaan sumber daya manusia yang potensial untuk menunjang pasar bebas, telah mengakibatkan pergeseran paradigma atau *pusedo paradigmatic* ilmu pengetahuan. Lahirnya NGO-NGO yang mengurus sumber daya manusia yang mengelola dan menciptakan masyarakat menjadi masyarakat lepas landas, kesemua praktek-praktek tersebut adalah pembentukan paradigma masyarakat menuju masyarakat kapitalis atau membentuk masyarakat menjadi Homo ekonomikus.

Apa yang telah penulis paparkan sepanjang skripsi ini, telah menelanjangi praktek-praktek neoliberalisme yang melakukan akumulasi lewat penjarahan, yang telah menghilangkan hak-hak dasar masyarakat sipil yang sepenuhnya dikelola oleh negara telah berpindah ke kantong-kantong kelas kelas elit. Jebakan utang, penciptaan krisis dan penciptaan pengangguran



yang terencana dan dikelola dengan baik adalah praktek-praktek akumulasi lewat penjarah aset-aset milik publik.

Permasalahan besar yang dihadapi oleh rakyat bangsa ini adalah kapitalisme dan neoliberalisme serta bagaimana cara untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hanya bangsa yang bodoh menanggulangi krisis dengan jalan mengimplementasikan praktek-praktek neoliberal. Dalam bagian saran dari skripsi ini, penulis mengajukan setidaknya ada dua rencana aksi untuk membendung dominasi kemapanan neoliberalisme.

#### 1. Agenda jangka panjang.

Reformasi Intelektual dan Moral sebagai basis conter hegomoni, dalam artian menciptakan hegomoni baru yang berlawanan dengan kaum kapitalisme, hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola berfikir dan pemahaman masyarakat tentang dunia kehidupan mereka serta norma dan prilaku moral mereka. Gramsci dalam gagasan politiknya mengatakan "semua manusia adalah filosof",<sup>4</sup> semua lelaki dan perempuan memiliki konsepsi tentang dunia kehidupan serta seperangkat gagasan yang memungkinkan mereka memahami kehidupan mereka. Namun, dalam cara mereka mempersepsi dunia kehidupan mereka, sering kali rancu dan bertentangan, karena pemikiran mereka berasal dari berbagai sumber dari kejadian-kejadian masa lalu, yang cenderung membuat mereka menerima ketidakadilan dan penindasan sebagai hal yang alamiah dan tidak dapat diubah (peran agama fundamental, kebudayaan dan kultur setempat yang membangun sikap penerimaan ini). Gramsci memakai istilah pemikiran awam (*common sence*) untuk menunjukan orang awam yang tidak kritis dan

<sup>4</sup> Ross Simon, *GAGASAN GAGASAN POLITIK GRAMSCI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan

tidak sadar dan kaku dalam memahami dunia kehidupannya. Pemikiran awam tidak harus dilihat dalam tolak ukur yang destruktif, pemikiran awam juga memiliki unsur-unsur positif, dan aktifitas praksis mereka, perlawanan mereka terhadap penindasan, mungkin sering berlawanan dengan gagasan kesadaran mereka. Pemikiran awam merupakan tempat dibangunnya ideologi, juga menjadi tempat perlawanan terhadap ideologi tersebut. Disini tugas para intelektual, organisasi-organisasi kemasyarakatan, cendekiawan muslim dan para pengiat seni membangun kesadaran masyarakat awam tentang dunia kenidupan melalui interaksi, sehingga terbangun masyarakat yang kritis terhadap dunia luarnya dan bertindak dengan kesadaran praksisnya.

Selanjutnya, dewasa ini berbagai aliansi yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang merupakan korban dari sistem yang timpang, seperti : organisasi buruh, organisasi petani, organisasi nelayan dan lain sebagainya. Dalam praksisnya organisasi-organisasi tersebut dalam praksis kerjanya membawa isu perlawanan lokalsitas, seperti organisasi buruh hanya memperjuangkan nasib para buruh begitu juga dengan organisasi petani dan nelayan, namun sejauh ini kesadaran mereka telah terbangun bahwa subordinasi terhadap tiga pilar ekonomi bangsa tersebut adalah sistem ekonomi pasar atau neoliberal. Namun, penyampaian dalam aspirasi politik organisasi-organisasi tersebut lebih mementingi kepentingan kelompok. Untuk membentuk conter hegomoni, diperlukannya melebur kepentingan kelompok menjadi isu sentral. Sebab praktek-praktek dehumanisme neoliberal, tidak hanya mensubordinasi kelas pekerja, namun

tradisional, masyarakat nelayan, masyarakat petani, masyarakat adat, penggiat transportasi dan masyarakat sipil lainnya yang hak-haknya dihilangkan oleh kebijakan-kebijakan sistem. Selanjutnya kesadaran bersama atas bahaya yang sama pada gilirannya mengembangkan kesadaran politik, dalam praksisnya membentuk partai reformis. Dengan demikian, ideologi berperan sebagai kekuatan perekat yang mengikat berbagai kelas dan strata yang berbeda-beda.

## 2. Agenda Mendesak Bangsa.

Hal ini dilakukan untuk mengembalikan dan menjalankan poros kesejahteraan tersebut. Setidaknya ada tiga agenda mendesak yang penulis tawarkan. *Pertama*, mendesak pemerintah untuk mengembalikan watak kebijakan publik kembali kepada konstitusi yang merupakan cita-cita mulia bangsa ini, Yakni bukan hanya mendapatkan legitimasi rasional namun memberikan landasan etis pada setiap kebijakan pembangunan. Pada ranah ini, setiap kebijakan pembangunan ekonomi tidak boleh meninggalkan kepentingan rakyat, walaupun kebijakan itu menguntungkan bagi tabungan negara. Kebijakan-kebijakan yang telah didisain oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang memprivatisasikan aset-aset kesejahteraan sosial dan aset-aset milik publik bersama lainnya yang dikerjakan secara asal-asalan, pemangkasan tunjangan sosial, seperti subsidi pendidikan kesehatan dan pemangkasan subsidi pada sektor pertanian sebagai imbas dari kebijakan liberalisasi pasar nasional, serta monopoli yang tidak logis dan kontrak bagi hasil migas kita yang ugul-ugalan yang lebih menguntungkan kontraktor asing harus segera dihentikan karena telah menghilangkan argumentasi etis

diluar pertimbangan pembuatan kebijakan. Singkatnya kebijakan publik harus diposisikan sebagaimana layaknya urusan bersama.

*Kedua*, Mendesak pemerintah untuk mengembalikan peran tradisional negara sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memfasilitasi secara monopoli atau pemain tunggal atas aset-aset yang berhubungan dengan kesejahteraan warga negaranya yang selama ini tersesih melalui serangkaian program jaminan sosial dan alokasi fasilitas publik. Negara dalam klasifikasi ini, harus menjamin pula hubungan produksi yang setara antara pelaku ekonomi sehingga tidak saling menjatuhkan (Kant, 1992).<sup>5</sup> Dengan begitu, secara oprasional, negara melalui anggaran yang dimiliki mengarahkan setiap alokasi dana pembangunan kepada tujuan-tujuan sosial sebagai pelapis setiap dampak pembangunan. Dengan sangat mudah, anggaran negara tersebut disalurkan kepada sektor-sektor yang memiliki jangkauan langsung kepada kebutuhan kaum miskin, misalnya memfasilitasi akses yang pendidikan murah, kesehatan gratis, perumahan yang layak huni, asupan kebutuhan pangan, penyediaan armada transportasi masal dan subsidi pengangguran. Kebijakan publik seperti ini bukan saja hanya mengurangi beban hidup pelaku ekonomi yang tersisih dari persaingan, tetapi juga merawat harmoni sosial diantara warga negara yang telanjur terfregmentasi dalam kelas ekonomi yang semakin timpang.

*Ketiga*, mendesak pemerintah untuk memberlakukan kebijakan reaktivasi ekonomi, redtribusi pendapatan dan restrukturisasi ekonomi. Pada saat ini negara dihadapi dengan performa ekonomi nasional yang buruk, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang moderat (moderate growth),

<sup>5</sup>Rinjani Khath. *CAPITALISM AND SOSIAL THEORY. The Science of Black Holes*. New York. M.E. Sharpe, Inc. 1992. Dalam Ahmad Erni Yustika. *EKONOMI POLITIK. Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2000. Hal.15

stagnasi (stagnation) bahkan depresi (depression). Pemerintah dalam hal ini memberlakukan kebijakan reaktivasi ekonomi, yang memungkinkan tercapainya dua tujuan yang lain, yakni, redistribusi pendapatan dan restrukturisasi ekonomi. Pada tahap ini redistribusi pendapatan dimulai dengan peningkatan standar upah yang nyata secara besar-besaran dalam artian pemerintah meningkatkan jumlah peredaran uang dengan peningkatan standar upah sembari menghindari peningkatan harga. Bahkan jika terjadi tekanan inflasi yang semakin berkembang, mendesak para pembuat kebijakan menolak untuk memberlakukan devaluasi, karena kebijakan devaluasi di implementasikan oleh pemerintah selama ini oleh, telah menghilangkan standar hidup, dan pada akhirnya menciptakan tekanan inflasi berkelanjutan tanpa ada hasil yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam pengertian ini restrukturisasi ekonomi berarti, melindungi pertukaran internasional, dan sebaliknya mendukung pertumbuhan yang tinggi dan upah nyata yang tinggi.

Dari rencana aksi tersebut diatas, keberhasilannya hanya bisa tercapai dengan adanya kemauan politik (*will politik*) dari mayoritas dan pemerintahan untuk mengembalikan negara ini dalam bentuk tradisonalnya dan meletakkan kebijakan publik pada tempat semestinya yang telah berpuluh-puluh tahun di raih bangsa ini dengan perjuangan kelas.

Sebagai penutup bab ini, penulis memperjelas posisi perjuangan politik dan menekankan semangat perlawanan terhadap sistem yang batil. Sebagai umat Islam sudah seharusnya terlibat dalam aktifitas politik. Melihat kerusakan sistem ekonomi dan politik yang berdampak pada krisis multi dimensional, untuk itu perlu diformasi Islam telah menentukan metode

untuk memperbaiki kerusakan dalam masyarakat dan negara, yaitu meneruskan pada yang baik (amar ma'ruf) dan mencegah yang batil (nahy mungkar). Metode tersebut digunakan untuk memperbaiki masyarakat dan mengoreksi tindakan penguasa yang telah menimbulkan kerusakan negara.

Perjuangan politik (kifah siyasi) adalah mengajak pada kebaikan, melarang kemunkaran, dan mengoreksi penguasa. Oleh karena itu terlibat dalam perjuangan politik merupakan kewajiban setiap individu muslim.

Allah swt berfirman :

*“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyeru kepada yang ma'ruf dan menjegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung “*  
(QS. Ali Imran : 104).

Selanjutnya dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari :

*“ Rasulullah menyeru kepada kami, dan kami membai'at kepadanya. Salah satu bagian dari bai'at tersebut adalah agar kami membai'at untuk mendengar dan mentaati pada saat lapang maupun sempit, pada saat sulit maupun mudah dan tidak mengutamakan diri kami. Dan hendaklah kami tidak merebut dari kekuasaan yang berhak (sabda Rasulullah saw) kecuali bila kalian melihat kekufuran nyata-nyata, kalian mempunyai bukti yang nyata dari sisi Allah swt. ”* (HR. Bukhari)

Ayat al-Qur'an dan Hadist diatas menunjukkan bahwa keterlibatan dalam politik merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Hal ini karena siyasah (politik) secara lughawi berarti memelihara urusan umat. Menentang kebijakan penguasa yang zalim merupakan bentuk aktifitas politik dan berarti pula mengurus umat. Menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan yang batil kepada penguasa yang mengakibatkan tererosinya hak-hak umat merupakan aktifitas mengurus umat. Begitu pula bersikap kritis dan berserbangan dengan penguasa tidak lain juga adalah bentuk aktifitas mengurus umat dan aktifitas mereka. Maka dari tuntutan al-Qur'an dan

Hadist Rasullulah saw melibatkan diri dalam aktifitas politik merupakan suatu kebajikan kaum muslimin.

Melibatkan diri dalam aktifitas politik disini bukan hanya melibatkan setiap individu atau organisasi masyarakat masuk atau terlibat dalam politik praktis, namun ada tiga aktifitas politik yang dapat penulis ajukan. *Pertama*, setiap individu mau menumbuhkan kesadaran politik konsep kesadaran disini dalam Al'Quar'an yaitu melembutkan hati tidak keras hati dalam artian mau berempati dengan fenomena kemiskinan. Ketika ruh empati ini masih dalam dataran ego nenibja istilah Freudian, untuk memunculkan super ego (kritik terhadap realitas sosialnya), maka setiap individu masuk dalam institusi-institusi intelektual dan pergerakan progresif sehingga kesadaran tersebut tercipta. Ketika kesadaran telah tercipta maka individu-individu akan dapat memproduksi ide-ide kritis (Konsep kesadaran menurut Marx). *Kedua*, restorasi organisasi Islam. Selama ini ormas Islam sebagai media dakwah akar rumput, yang menitikberatkan pencerahan nilai-nilai Islam pada umat, namun menurut penulis dalam perjalanannya, dakwah menjadi instrumen yang statis ketika umat diserang dengan kekuasaan negara dan para pemilik modal, sehingga, dalam faktanya akhir-akhir ini banyak kasus yang melanggar hak-hak dasar umat. Restorasi yang penulis maksud disini, yaitu memberikan perlindungan dan pembelaan hak-hak dasar umat, baik umat muslim maupun umat non muslim yang terlibat dalam subordinasi penguasa dan para elit ekonomi. Perlindungan dan pembelaan hak-hak dasar ini dapat di materialkan dalam bentuk organisasi advokasi, seperti advokasi hukum yang berwawasan Islam, organisasi-organisasi perlindungan wanita dan lain sebagainya. Sangat baik. Ketika Islam sendiri adalah agama yang mempromosikan

**memerangi hal-hal yang kemiskinan, hal-hal yang batil dan melindungi hak-hak dasar manusia, namun tidak diwujudkan pada ormas-ormas Islam. Maka jangan menyalahkan umat yang merasa melindungi diri mereka.**